



# Buletin Parlementaria

Nomor 1182/II/I/2022 • Januari 2022



## DPR Apresiasi Kementerian PUPR Revitalisasi Pasar Legi Solo



3 Pembangunan IKN  
Harus Jadi Momentum  
Penggerak dan  
Pemerataan Ekonomi



5 Gus Muhaimin Nilai  
Pemerintah Harus  
Bangkitkan Ekonomi  
Kreatif di Bantul



9 772614 339005

# DPR Apresiasi Kementerian PUPR Revitalisasi Pasar Legi Solo



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meninjau Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Foto: Gerald/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah merampungkan revitalisasi Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Puan menjelaskan revitalisasi pasar yang pernah terbakar hebat pada 2018 ini, awalnya diharapkan selesai pada tahun 2021. Namun, karena pandemi Covid-19 yang membutuhkan *refocusing* anggaran, akhirnya baru

dapat diresmikan pada awal Januari 2022 saat ini.

“Saya beberapa waktu lalu pernah datang ke sini dengan Wali Kota Solo, dan Menteri PUPR untuk lihat renovasi Pasar Legi yang baru saja dibangun dan belum selesai. Lalu, saya tanya kapan bisa diselesaikan? Akhirnya komitmen itu dijalankan KemenPUPR, yang tadinya mau diresmikan pada 2021 tapi ditunda karena Covid-19 dan akhirnya baru bisa diresmikan pada hari ini,” ujar Puan saat memberikan sambutan pada

peresmian revitalisasi Pasar Legi, Solo, Jateng, Kamis (20/1).

Puan berharap pasca revitalisasi, pasar yang terdiri dari tiga lantai ini nantinya bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat Solo semata, tapi juga bagi masyarakat di Solo Raya (Surakarta). Sebab, dengan hadirnya pasar, dapat terlihat indikator pergerakan ekonomi di masyarakat bawah. Juga dapat terlihat indikator sosial keamanan saat pedagang satu sama lain saling berjualan serta interaksinya dengan pembeli.

“Di pasar, kita juga bisa evaluasi bagaimana harga barang, apakah kebutuhan sandang, pangan, papan sudah dapat terpenuhi di masyarakat, apakah ketersediaannya ada atau tidak. Karena itu, pasar tradisional perlu dipertahankan karena barang-barang yang dijual berasal langsung dari hasil rumah petani, kebun dan ladang dari petani, masyarakat kecil,” ujar perempuan pertama Ketua DPR RI ini.

Selain itu, saat peninjauan, Puan sempat mendapat keluhan bahwa saat terjadi hujan deras, tampias untuk menampung air hujan tidak cukup baik sehingga mengalirkan air hujan tersebut ke bawah pasar dan menggenangi kios-kios yang berada di lantai dasar.

“Karena konsep pasar ini adalah *Green Building*, jadi dicari harus bagaimana caranya agar kalau hujan tidak genangi bagian bawah. Hal-hal seperti itu harus dibenahi dan dalam pengawasan DPR, saya minta Menteri PUPR selesaikan hal-hal mana saja yang harus diperbaiki agar bisa segera dilakukan,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Di kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basoeki Hadimuljono menjelaskan program revitalisasi pasar tradisional merupakan program prioritas presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2019. “Peresmian ini adalah pasar yang ke-15 yang diresmikan oleh Ketua DPR RI dari seluruh pasar di Indonesia, dari Trenggalek, Ngawi, Klaten, di Jogja juga ada,” tambah Menteri Basoeki. ■ rdn/sf

# Pembangunan IKN Harus Jadi Momentum Penggerak dan Pemerataan Ekonomi

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah ditetapkan di Kalimantan Timur. Momentum tersebut harus menjadi upaya untuk menggerakkan dan pemerataan perekonomian dalam negeri. Gobel mengingatkan jangan sampai APBN justru akan dinikmati orang asing.

“Ada tiga hal penting dari pembangunan IKN ini, khususnya untuk kemajuan dan pemerataan ekonomi serta perbaikan kehidupan sosial dan lingkungan hidup,” ucapnya



Wakil Ketua DPR RI  
Rachmat Gobel.  
Foto: Azka/rvi

dalam keterangan pers kepada *Parlementaria*, Kamis (20/1).

Pertama, ungkap Gobel, pembangunan IKN akan berpotensi memiliki dampak positif bagi kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, kawasan ini selama ini paling tertinggal di segala lini, seperti pendidikan, infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, dan juga dalam bidang ekonomi.

Lima wilayah termiskin ada di Indonesia timur, yaitu secara berurutan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. “Dengan perpindahan ibukota diharapkan bisa memperbaiki keadaan secara lebih cepat,” ujar Gobel.

Faktor jarak ibu kota yang akan lebih dekat, katanya, berpotensi memperbaiki mobilisasi penduduk, perhatian, kepedulian, dan distribusi barang serta jasa. “Nanti kita lihat saat pembangunan, apakah tenaga kerja dan dukungan material akan berpengaruh atau tidak,” terang politisi Partai NasDem itu.

Adanya perpindahan ibu kota ini diharapkan akan memperbaiki ketimpangan ekonomi dan ketimpangan wilayah yang selama ini lebih dinikmati di wilayah barat. “Dengan perpindahan ibu kota baru ini, diharapkan terjadi redistribusi yang selama ini begitu sulit dilakukan. Kita optimistis ke depan akan terjadi akselerasi pembangunan dan kemajuan di Indonesia timur,” tutur Gobel. ■ es



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto S.Sos., M.A. (Kabag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budirman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Metske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rim bani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widnyowati, Rosnita

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Puan Maharani Harap Perjanjian Ekstradisi RI - Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Gerald/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam sejumlah hal, termasuk soal ekstradisi. Ia berharap perjanjian ekstradisi dapat meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Melalui perjanjian ini, kedua negara dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkoba,

terorisme dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

"DPR RI menyambut baik kerja sama antara Indonesia dengan Singapura, khususnya perjanjian hukum antara kedua negara terkait ekstradisi. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Semoga kesepakatan ini dapat memperkuat komitmen penegakan hukum di Indonesia," ungkap Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/1).

Puan memuji diplomasi Pemerintah dengan Singapura yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam acara Leader's Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1). Lewat perjanjian ekstradisi, buron kejahatan yang selama ini kabur ke Singapura bisa segera diproses hukum. Selain itu, Indonesia juga bisa melakukan penggeledahan dan menyita aset pelaku kejahatan yang berada di Singapura sesuai sistem hukum kedua negara.

"Tentunya perjanjian ini akan membantu para penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam kasus-kasus transnasional. Ini pencapaian yang baik apalagi perjanjian ekstradisi tersebut memiliki masa retroaktif selama 18 tahun ke belakang," papar mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. Selain soal ekstradisi, ada dua kesepakatan lain yang dilakukan Indonesia.

Pertama adalah mengenai penyesuaian pengelolaan ruang udara Indonesia yang selama ini dipegang Singapura atau *Flight Information Region (FIR)* di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Salah satu poin kesepakatan seputar FIR disebut masih mengizinkan Singapura mengelola sebagian ruang udara di wilayah tersebut. Puan meminta Pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik. "Harus ada penjelasan yang lebih mendalam sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," imbau politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Kesepakatan terakhir antara Indonesia dan Singapura yaitu soal pemberlakuan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah digagas sejak tahun 2007. Kerja sama yang dimaksud terkait Defence Cooperation Agreement (DCA). "Kami berharap perjanjian kerja sama DCA tetap mengedepankan kepentingan pertahanan Negara. DPR RI siap membahas perjanjian antara Indonesia-Singapura sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku," tutup Puan. ■ ann/sf

# Gus Muhaimin Nilai Pemerintah Harus Bangkitkan Ekonomi Kreatif di Bantul



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat berkunjung ke Kampung Batik Giriloyo di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Foto: Chasbi/rvi

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kampung Batik Giriloyo untuk menyerap aspirasi dari para perajin batik di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membangkitkan sentra ekonomi kreatif (ekraf) seperti Kampung Batik Giriloyo ini. Sehingga pemerintah perlu turun tangan untuk membangkitkan kampung batik itu.

“Pertama, pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang menuju lokasi kampung batik. Tidak perlu pandang bulu apakah itu jalan

kabupaten, jalan provinsi atau jalan negara, terutama pemerintah pusat hendaknya turun tangan mengatasi infrastruktur yang menuju lokasi ini,” tegas Gus Muhaimin di sela-sela berkunjung ke Kampung Batik Giriloyo di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (23/1).

Kemudian, Gus Muhaimin melanjutkan, yang kedua ialah promosi yang menuntut semuanya harus bergerak bersama-sama baik pemerintah pusat, daerah maupun sentra-sentra. “Pemerintah punya kekuatan (anggaran). Kalau (biaya) promosi dibebankan pada perajin dan sentra-sentra saya kira agak lamban

karena suasananya masih sulit,” tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII itu.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu melanjutkan, yang ketiga ialah terkait dengan produksi yaitu permodalan instan. Karena pasca-pandemi UMKM sudah lama berhenti selama dua tahun, maka harus ada dukungan permodalan kembali. “Nah tiga hal ini saya dorong dan saya dukung melalui DPR RI melalui APBN dan melalui revisi anggaran yang kita siapkan. Yang penting tiga hal itu, infrastruktur, promosi dan permodalan ini harus dilakukan,” pesannya. ■ cas/sf

# Komisi II Desak BKN Perkuat Sistem Keamanan IT Seleksi CPNS

**K**etua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendesak pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menaruh perhatian serius terhadap penataan sistem keamanan IT seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kedepannya. Dengan demikian, diharapkan ke depannya tidak terulang lagi berbagai tindak kecurangan

”

**SAYA TEGASKAN KEMBALI BERBAGAI HASIL EVALUASI INI YANG AKAN KOMISI II DPR RI KAJI, AKAN KAMI BAHAS DAN AKAN KAMI PERDALAM DALAM RAPAT KOMISI II DPR RI MENDATANG DENGAN MITRA-MITRA KERJA TERKAIT SEPERTI BKN DAN KEMENPAN-RB**

Ketua Komisi II DPR RI  
Ahmad Doli Kurnia Tandjung.  
Foto: Puntho/mvi

oknum peserta seperti yang terjadi pada seleksi CPNS 2021 baru-baru ini.

Demikian ditegaskan Doli usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel dalam rangka evaluasi kecurangan dalam rekrutmen CPNS Tahun 2021, di Kantor Regional IV BKN Sulsel, Makassar, Jumat (21/1).

“Kanreg BKN Sulsel dalam pertemuan mengemukakan adanya permasalahan keamanan sistem yang masih dapat dijebol oleh oknum peserta seleksi CPNS 2021 lalu di delapan titik. Komisi II berharap permasalahan tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah melalui adanya penataan sistem supaya tidak terulang kembali suatu peluang atau celah apapun terhadap berbagai upaya penyimpangan-penyimpangan seperti *remote access*,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Tak hanya itu, Doli meminta adanya peningkatan koordinasi antar Kementerian yakni antara BKN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, aparat penegak hukum serta dengan Kementerian Keuangan dalam kaitan dengan pembahasan anggaran. Tujuannya, untuk tercapainya penguatan sistem keamanan seleksi CPNS ke depannya yang tidak bisa dijebol serta dapat mengantisipasi berbagai modus kecurangan oknum peserta.

“Kemudian, kalau ditarik lagi ternyata permasalahan keamanan sistem ini berkaitan dengan masalah perencanaan yang belum matang dan juga terkait penganggaran. Jadi, permasalahannya begitu kompleks. Maka saya tegaskan kembali berbagai hasil evaluasi ini yang akan Komisi II DPR RI kaji, akan kami bahas dan akan kami perdalam dalam rapat Komisi II DPR RI mendatang dengan mitra-mitra kerja terkait seperti BKN dan Kemenpan-RB,” tutup legislator dapil Sumatera Utara III tersebut. ■ pun/sf



# Komisi II Sesalkan Adanya Kecurangan di 9 Tilok Mandiri pada Seleksi CPNS 2021

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyesalkan adanya kecurangan yang terjadi di sembilan titik lokasi (tilok) mandiri, dalam penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Ada laporan yang beredar di media dan masyarakat, ada 225 peserta yang melakukan kecurangan dalam seleksi CPNS.

“Saya merasa prihatin melihat kondisi dari pada penyelenggaraan seleksi CPNS 2021, sangat disesalkan dan disayangkan kecurangan bisa terjadi. Seperti yang sering saya katakan, nilai dari pada kejujuran belum menjadi (nilai) yang *universal* belum diberlakukan di tanah air. Kecurangan selalu mencari-cari tempat untuk terus berulang, modus yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab,” katanya usai memimpin Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Seleksi CPNS 2021 Komisi II DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (20/1).

Sembilan titik lokasi mandiri yang terindikasi kecurangan yakni berada di, Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Buol (Aula BKPSDM Buol), Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Enrekang (Aula Kantor Bupati Enrekang), Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Mamuju (Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat), Tilok Mandiri BKN Lampung (Aula Makorem 043 Garuda Hitam), dan Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Mamasa (Aula SMKN 1 Mamasa).

Kemudian Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Ruang Pola Kantor Bupati Sidenreng

Rappang), Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Luwu (Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu), Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Gedung Baruga Buton Selatan), Tilok Mandiri Kementerian Hukum HAM Sulawesi selatan (Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar).

Selain itu Komisi II DPR RI menilai kecurangan yang dilakukan oleh 225 peserta CPNS saat mengikuti tes seleksi kemampuan dasar pada tahun 2021 lalu sangat disesalkan, mengingat jumlahnya yang tidak kecil. Menyikapi persoalan tersebut, lanjut Syamsurizal, Komisi II DPR RI mengharapkan adanya perlindungan semacam keamanan dari Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan seperti sembilan titik lokasi tersebut, sehingga ke depannya tidak lagi kecurangan.

“Mengapa persoalan ini menjadi perhatian kita yang duduk di Komisi II, pasalnya kami mempunyai tanggung jawab moril terhadap penerimaan calon CPNS, yang diharapkan

peserta-peserta yang lulus harus memiliki kualitas yang baik dalam bekerja sesuai formasi yang di pilihnya serta menjadi pegawai negeri sipil yang memiliki tujuan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, menjadi orang yang berkualitas dalam proses penyelenggaraan negara. Karena kita tahu persis bahwasanya PNS yang dibina oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu dari pada mitra kita, untuk itu Komisi II mempunyai tanggung jawab secara moril,” pungkasnya. ■ rmi/sf.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Runi/mvl



# Pantau Penanganan Covid-19, Komisi III Sambangi Polda dan Kejati Lampung

**K**unjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung menitikberatkan adanya sinergitas dan keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pendampingan, pengawasan dan kegiatan yang berorientasi pada pencegahan, serta keseriusan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang saat ini menjadi pusat perhatian serta penerapan penegakan hukum berlandaskan *Restorative Justice* (RJ) terhadap kasus-kasus tertentu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, kunjungan kerja kali ini adalah memeriksa kembali jika ada pelanggaran pidana dalam pemberian

bantuan Covid-19. “Kunjungan kerja kali ini adalah khusus kepada mitra kami, yakni Polda Lampung dan Kejati Lampung,” kata Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno dan Kajati Lampung Heffinur beserta jajaran, di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (21/1).

Dalam kesempatan ini Komisi III DPR RI menanyakan apakah ada kasus hukum yang berkaitan dengan pemberian bantuan dan penanganan Covid-19 di daerah Lampung. Berdasarkan pemaparan Kapolda dan Kajati, sejauh ini belum ditemukan kasus hukum terkait penyalahgunaan bantuan Covid-19. “Tetapi, memang ada beberapa daerah yang memiliki catatan dalam penanganan Covid-19 seperti keramaian dan sebagainya, namun

bisa diselesaikan dengan baik oleh jajaran Polda Lampung,” kata Adies.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menambahkan, secara keseluruhan penanganan kasus yang berkaitan dengan Covid-19 sudah *on the track*. Sinergitas dan keseriusan APH di Lampung dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional melalui pendampingan, pengawasan, dan kegiatan yang berorientasi pada pencegahan dinilai sudah berjalan dengan baik. “Saya mengapresiasi kinerja Polda Lampung dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Capaian vaksin juga sudah bagus sekali, di atas 80 persen, kami apresiasi kerja keras Polda Lampung dan Kejati Lampung,” kata Adies. ■ man/sf



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin Kunspek Komisi III DPR RI ke Lampung. Foto: Andri/nvl



# Kunjungi PT Bukit Asam Lampung, Komisi VI Optimis Ketersediaan Batu Bara untuk PLN

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan, sebagai salah satu tindak lanjut rapat dengar pendapat umum Komisi VI DPR RI dengan asosiasi pengusaha tambang batu bara beberapa waktu yang lalu, dan menyikapi krisis stok batu bara untuk pasokan dalam negeri, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Bukit Asam Tbk di Pelabuhan Tarahan, Lampung.

“Sebenarnya kita ingin mengetahui apa sebab musabab kita sampai terjadinya krisis stok batu bara untuk kebutuhan energi listrik nasional kita atau PLN. Itu yang kita lakukan langsung spesifik ke Bukit Asam sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang batu bara. Sejauh mana kontribusi PT Bukit Asam terhadap pembangkit nasional kita dan sejauh mana hal-hal yang menyangkut larangan ekspor (batu bara), begitu juga rencana hilirisasi itu sudah dikerjakan PT Bukit Asam,” ungkap Aria Bima di PT Bukit Asam, Lampung, Kamis (20/1).

Aria Bima mendapati informasi bahwa pasokan batu bara PT Bukit Asam mencapai 154 persen yang berarti sudah melebihi *Domestic Marketing Obligation* (DMO) di atas ketentuan dan masih sangat memungkinkan untuk dinaikkan kembali. Diketahui Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan DMO menyebutkan bahwa kewajiban pengusaha batu bara menjual 25 persen dari total produksi kepada PLN per tahun.

“Ternyata kita cukup optimis baik untuk *buffer stock* atau ketersediaan batu bara kita untuk PLN, karena ternyata PT Bukit Asam sudah lebih untuk DMO-nya dan sudah mencapai 154 persen di atas ketentuan

”

**PT BUKIT ASAM JUGA MENYAMPAIKAN KOMITMENNYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI DALAM NEGERI BAIK UNTUK STOK BATUBARA ATAU KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK UNTUK PLN, DIHARAPKAN KEBUTUHAN ENERGI DALAM NEGERI AKAN TERUS TERJAGA DENGAN AMAN**

yang sudah ditetapkan, itupun masih sangat mungkin untuk dinaikkan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

“Kesepakatan kita secara politis bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, energi dasar buat kelistrikan kita akan lebih diprioritaskan. Untuk larangan ekspor kali ini memang jelas akan mempengaruhi *cash flow* Bukit Asam yang setelah kemarin terhantam dalam situasi Covid-19. Tetapi demi hal-hal yang berkaitan dengan tidak hanya diukur dari *benefit corporation*, tapi bagaimana *benefit ratio* untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang lebih besar,” tutur legislator dapil Jawa Tengah V itu.

PT Bukit Asam juga menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri baik untuk stok batu bara atau kebutuhan energi listrik untuk PLN, diharapkan kebutuhan energi dalam negeri ke depannya akan terus terjaga dengan aman. ■ skr/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Singgih/nvl

# Gde Sumarjaya Linggih: Bukit Asam Telah Penuhi Target DMO kepada PLN

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan, PT Bukit Asam Tbk telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan *Domestic Market Obligation* (DMO) kepada PT PLN (Persero). Hal itu dikatakan Demer, sapaan akrabnya, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Timur, Kamis (20/1).

“Mereka melakukan DMO atau *Domestic Market Obligation* sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan mereka sudah memaparkan bahwa ada 115 persen dari DMO yang seharusnya mereka berikan kepada PLN. Jadi saya rasa di BUMN, khususnya PT Bukit Asam Tbk, tidak ada masalah terkait dengan DMO kepada pihak PLN, dan nanti

yang di swasta juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti itu juga, sehingga apa yang dikhawatirkan tentang krisis ketahanan energi tidaklah terjadi,” jelas Demer.

”

**WALAU PUN POSISI DARIPADA PT BUKIT ASAM TIDAK TERLALU BESAR PORSINYA, YAKNI HANYA 10 PERSEN DIBANDINGKAN YANG LAIN, NAMUN SAYA BERHARAP MEREKA MAMPU BEKERJA DENGAN BAIK. UNTUNG BOLEH TAPI DAMPAK *BENEFIT* YANG HARUS DITIMBULKAN SEBAGAI BUMN ITU HARUS TERUS TERJAGA**

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berjalan dengan baik, dengan demikian diharapkan seluruh lapisan masyarakat juga bisa ikut menikmati atau memanfaatkan energi untuk kepentingan usaha maupun untuk kepentingan kenyamanan hidupnya.

“Harapan kami, ke depan perusahaan ini tetap dapat menjaga kualitas perusahaannya. Saya juga berharap bahwa PT Bukit Asam terus tumbuh menjadi penyangga ketahanan energi nasional. Walaupun posisi daripada PT Bukit Asam tidak terlalu besar porsinya, yakni hanya 10 persen dibandingkan yang lain, namun saya berharap mereka mampu bekerja dengan baik. Untung boleh tapi dampak *benefit* yang harus ditimbulkan sebagai BUMN itu harus terus terjaga,” tutup legislator dapil Bali tersebut. ■ dep/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Timur. Foto: Dev/nvl

# Komisi VI Apresiasi Suplai Batu Bara PT Bukit Asam Jauh Melebihi Ketentuan DMO

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi PT Bukit Asam yang mampu menyuplai batu bara ke PT PLN (Persero) lebih dari *Domestic Marketing Obligation* (DMO) yang ditentukan pemerintah. Peraturan Menteri (Permen) terkait DMO menyebutkan bahwa kewajiban pengusaha batu bara menjual 25 persen dari total produksi kepada PLN per tahun.

“Kami, Komisi VI DPR datang ke PT Bukit Asam ini untuk melihat secara langsung ketersediaan stok batu bara di PT Bukit Asam ini. Karena Bukit Asam menjadi salah satu pemasok atau penyuplai batu bara untuk PLN yang sebagaimana diketahui belakangan mengalami kekurangan stok batu bara,” ujar Martin usai meninjau langsung ketersediaan batu bara di PT Bukit Asam, Sumatera Selatan, Kamis (20/1).

Dalam kesempatan itu Komisi VI DPR RI tidak hanya mendapati informasi



Komisi VI DPR RI saat bertukar cinderamata usai meninjau ketersediaan batu bara di PT Bukit Asam. Foto: Ayu/nvi

kecukupan stok batu bara yang ada, namun juga mendapat penjelasan secara langsung bahwa selama ini PT Bukit Asam mampu menyuplai batu bara ke PLN sebesar 154 persen. Hal ini jauh melebihi ketentuan DMO yang telah ditetapkan pemerintah.

“Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi hal (capaian) itu. Bahkan kami juga berharap agar PT Bukit Asam

dan beberapa perusahaan lain yang telah menjalankan kewajiban (bahkan melebihi) DMO yang ditetapkan, agar bisa diberikan kesempatan ekspor (batu bara),” jelas politisi Partai NasDem ini.

Pasalnya, lanjut Martin, pelarangan ekspor beberapa waktu lalu sangat mempengaruhi PT Bukit Asam dan beberapa perusahaan lain yang sudah menjalankan kewajibannya. Bukan tidak mungkin hal tersebut juga akan mempengaruhi kepercayaan perusahaan lain terhadap PT Bukit Asam. Bahkan hal ini juga mempengaruhi kepercayaan negara lain terhadap Indonesia.

Dalam kesempatan itu hadir juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, dan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Duriyanto, Evita Nursanty, Sondang Tiar Debora Tampubolon, Mufti An'am, Nusron Wahid, Singgih Januratmoko, Khilmi, Rudi Hartono Bangun, Daeng Muhammad, Rafli dan Zuristyo Firmadata. ■ ayu/sf



# Komisi VII Minta PT SMART Berikan Data Konkret Luasan Lahan dan Jumlah Produksi

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menekankan, Komisi VII DPR RI meminta kepada anak perusahaan PT Sinarmas Agro Resource and Technology (SMART) Tbk di wilayah Riau untuk memberikan data yang konkret terkait dengan luasan lahan dan jumlah produksi *palm oil* (kelapa sawit) yang dihasilkan.

“PT SMART, itu (berbasis) kelapa sawit yang memicu juga sekarang dengan harga minyak goreng naik. Kembali lagi kepada lahan juga apa yang mereka lakukan. Lahan ini dari yang kata mereka itu 83.000 (hektare), 51.000 hektare adalah intinya, kemudian 32.000 hektare adalah plasma. Apakah benar produksi itu apa benar? Nah ini kita minta data, tadi tidak terjawab, data yang konkret yang kita butuhkan,” ungkap Dony usai

memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1).

Menurut Dony, data konkret luas lahan dan jumlah produksi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, politisi PDI-Perjuangan ini menyelaskan direksi anak perusahaan PT SMART Tbk yang ada di wilayah Riau tidak dapat memberikan data yang konkret dalam kunjungannya ini.

“Kembali lagi untuk pendapatan negara, negara dapat apa dan apa yang diterima oleh rakyat. Nah ini selanjutnya target ini yang kita minta dan tadi tidak terjawab. Jujur perwakilan dari PT SMART ini tidak dapat menjawab secara konkret, ini yang sungguh kita sesalkan sebenarnya. Jadi kita minta juga

PT SMART bisa menjawab (dan) memberi masukan sebagai bahan kita, kalau tidak

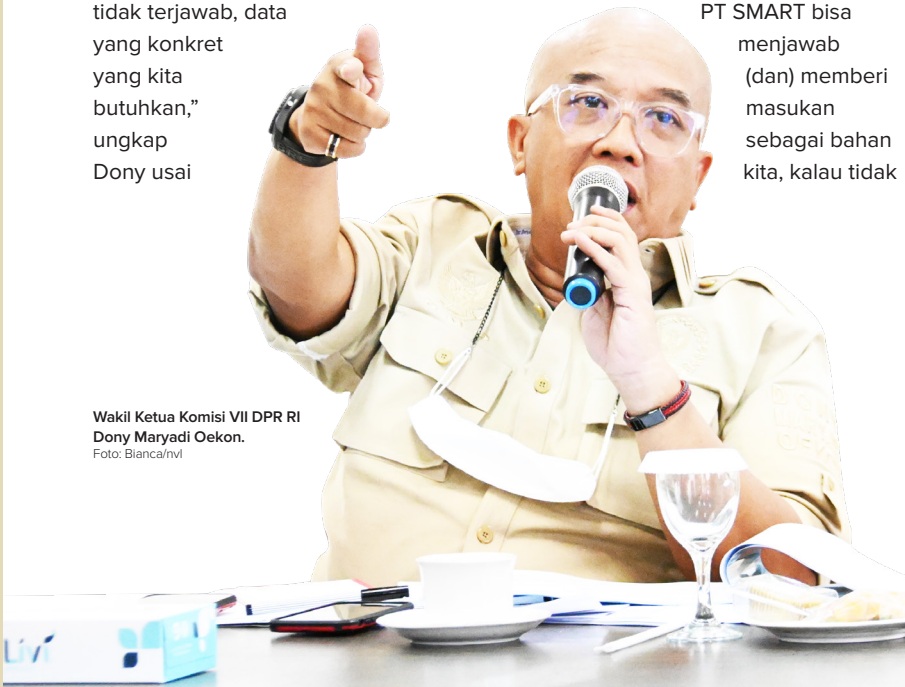
nanti kita bawa ke sidang ke RDP di DPR nanti, karena kembali lagi ini kita targetnya adalah pendapatan negara,” imbuh Dony.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI ini melanjutkan, bahwa DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) akan terus mendorong dan mengawasi pendapatan negara. “Kita kan di DPR hari ini ada Panja PPN, pendapatan negara ini harus kita kejar karena negara kita butuh dari mana kita bisa ambil dana yang seharusnya masuk ke pemerintah seharusnya masuk negara. (Pendapatan negara yang) tidak diterima oleh negara hari ini, ini yang kita kejar hari ini,” tutupnya.

Sebagai informasi, PT SMART adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. PT SMART mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 4 pabrik pengolahan inti sawit dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. Selain minyak curah dan minyak industri, produk turunan SMART juga dipasarkan dengan berbagai merek, seperti Filma dan Kunci Mas.

Sebagai gambaran, aktivitas utama SMART yakni pengelolaan sekitar 138 ribu hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanenan dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), hingga memprosesnya menjadi beragam produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, *shortening*, biodiesel dan oleokimia, serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. ■ **bia/sf**

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI  
Dony Maryadi Oekon.  
Foto: Bianca/nvi



# Tekan Impor Bahan Baku Gula, Komisi VII Dorong Sinergi Antar Pihak

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mendorong sinergi baik

pemerintah, DPR maupun pelaku industri guna menekan laju impor bahan baku gula yang menjadi bahan baku dalam pembuatan gula. Hal itu disampaikan Bambang ketika memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Sentra Usahatama Jaya dan PT Jawa Manis Rafinasi di Cilegon, Banten, Jumat (21/1).

“Makanya kita dorong nanti akan ada sinergi, pupuk kita dibuat di Indonesia. Indonesia juga memiliki lahan yang cukup untuk bertani tebu ini. Nah, sebenarnya kalau kita rumuskan secara bersama, Insya Allah ini bisa kita atasi dan kita bisa mengurangi impor bahan baku,” tegas Bambang.

Diketahui, kunjungan kerja tersebut fokus pada penetapan kuota impor gula rafinasi. Terlebih telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

Bambang juga ingin memastikan pelaku industri gula rafinasi ini dalam menjalankan produksinya menjaga tingkat kebocoran di masyarakat yang terjadi akibat selisih harga yang cukup tinggi antara gula rafinasi dan gula konsumsi. Selisih harga yang besar dalam peredaran gula tersebut menurutnya sangat merugikan petani. “Nah ini yang harus kita pastikan tidak

Wakil Ketua  
Komisi VII DPR RI  
Bambang Hariyadi.  
Foto: Hird/mvl



terjadi rembes-rembes di bawah karena ini sangat merugikan petani,” wantinya.

Politisi Partai Gerindra itu pun mendorong agar ke depan semangat untuk impor gula ini harus diperkecil. Dalam kunjungan ke lapangan tersebut ditemukan pula pelaku industri gula hingga kini tidak memiliki lahan untuk memproduksi bahan baku yang sebetulnya menjadi kewajiban dalam amanat undang undang yang ada. Ia melanjutkan, bahan baku gula tersebut sebetulnya bukan tidak ada secara ketersediaan. Namun, untuk memenuhinya menyangkut niat dari para *stakeholder*.

Sehingga, dirinya sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI akan bertindak tegas untuk memberikan kepastian agar tidak bergantung pada bahan baku impor. “Dan kita ingin niatnya hanya sekadar diimbau, tetapi kita harus berikan kepastian. Kalau perlu kalau mereka yang tidak ingin mengikuti keinginan

pemerintah untuk menguatkan petani dalam negeri, dan selalu bergantung kepada impor, DPR bisa saja mendorong agar ke depannya untuk dikurangi atau ditutup (perusahaan gula),” tegas legislator dapil Jawa Timur IV itu.

Bambang pun memastikan pihaknya akan membahas hal tersebut dalam rapat kerja bersama kementerian perindustrian. Terlebih, impor yang dilakukan industri ini tidak sesuai dengan semangat presiden untuk mengurangi impor bahan baku dari luar.

“Sebenarnya kita juga tidak menutup peluang untuk impor. Namun, bukan berarti kita selalu bergantung kepada impor. Kita paham bahwa ini, dengan dasarnya impor ini, ada saudara- saudara kita, petani Indonesia, nasibnya makin terpuruk. Niatan menanam tebu juga semakin kecil di tengah petani kita,” ungkap Bambang. ■ hal/sf

# Komisi VII: Nuklir Energi Baru yang Bersih dan Layak Dikembangkan

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan nuklir sebagai salah satu energi baru yang bersih dan layak untuk dikembangkan di Indonesia. Pihaknya berharap ke depannya Indonesia bisa memanfaatkan energi nuklir untuk kegunaan dan manfaat yang lebih besar, di antaranya untuk pembangkit listrik.

“Sebagai negara yang memang menargetkan bahwa EBT (Energi Baru dan Terbarukan) yang sangat tinggi ke depannya, nuklir menjadi salah satu alternatif kita,” ucap Eddy saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke DIY mengunjungi Reaktor Nuklir Kartini BRIN di Yogyakarta, Kamis (20/1).

Dari aspek biaya, aspek keamanan dan aspek lokasi, menurut Eddy untuk pembangunan reaktor nuklir cukup terbatas di Indonesia, tetapi menurutnya hal ini bisa dikembangkan, apalagi teknologi nuklir ini sudah bisa mengembangkan pembangkit listrik nuklir modular, yang tidak perlu biaya besar, tidak perlu pembangkit dengan kapasitas besar, dan bisa dibangun



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke DIY. Foto: Eno/nvl

relatif di daerah-daerah yang memang memiliki kontur tanah dan lahan yang memang cocok seperti di Kalimantan Barat dan di Bangka Belitung.

“Ke depannya kami berharap bahwa memang akan ada peningkatan kapasitas dan teknologi, karena memang reaktor ini sudah relatif tua usianya, sudah dibangun dan beroperasi sejak Tahun 1979, jadi memang diperlukan peremajaan dan peningkatan kapasitas, karena

kapasitasnya hanya 100 KW,” ujar Eddy.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menambahkan, Komisi VII DPR RI sudah melihat bahwa hasil-hasil produk yang memang merupakan pengembangan dari riset dan pengembangan teknologi nuklir itu sudah layak untuk dijadikan bahan untuk ekspor, akan tetapi masih butuh lagi fasilitas riset yang lebih mumpuni, yang lebih maju secara teknologi, dan lebih *up to date* secara teknologi.

“Saya kira Indonesia sebagai negara besar yang memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai hasil teknologi dari nuklir, termasuk mengekspornya. Saya kira merupakan salah satu negara dengan peluang besar untuk bisa menggunakan nuklir ini untuk pengembangan hal-hal yang sifatnya tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk aspek pertanian misalnya,” ungkap legislator dapil Jawa Barat III tersebut. ■ eno/sf

”

**KE DEPANNYA KAMI BERHARAP BAHWA MEMANG AKAN ADA PENINGKATAN KAPASITAS DAN TEKNOLOGI, KARENA MEMANG REAKTOR INI SUDAH RELATIF TUA USIANYA, SUDAH DIBANGUN DAN BEROPERASI SEJAK TAHUN 1979, JADI MEMANG DIPERLUKAN PEREMAJAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS, KARENA KAPASITASNYA HANYA 100 KW**



# Komisi VIII: Ponpes Amanatul Ummah Bisa Menjadi Percontohan

**K**etua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur bisa menjadi literasi bagi Komisi VIII DPR RI, seperti yang dicontohkan oleh Kiai Asep Syaifudin Chalim sebagai pendiri Ponpes Amanatul Ummah yang telah sukses dengan kemandirian ponpes yang dipimpinya. Yandri mengapresiasi kemandirian Ponpes Amanatul Ummah, sehingga dapat dijadikan percontohan bagi ponpes lainnya.

Hal tersebut disampaikan Yandri saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Ponpes

Amantul Ummah di Mojokerto, Jatim, Sabtu (22/1). Selain menilai dan melihat langsung keberhasilan ponpes yang didirikan Prof Dr KH Asep Syaifudin Chalim sebagai ponpes modern dan mandiri tersebut, pertemuan tersebut juga membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Peran pesantren semakin luas sebagai pendorong berkembangnya ekonomi dan basis keterampilan para santri. (Pendidikan) Ponpes Amanatul Ummah sudah melebihi undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren masih berbicara tentang rencana, sementara (Ponpes) Amanatul Ummah

sudah melampauinya,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurut keterangan yang diterima Yandri, dijelaskan bahwa Ponpes Amanatul Ummah berdiri pada tahun 2006 yang dulunya jauh dari penduduk dan gelap gulita. “Tidak sedikit yang pesimis bahkan menertawakan tentang keberadaan Amanatul Ummah, tetapi Kiai Asep tetap melanjutkan cita-citanya bahkan mendirikan madrasah bertaraf internasional,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Banten II itu.

Pendiri Ponpes Amanatul Ummah, Kiai Asep Saifuddin Chalim mengatakan, kunci sukses dalam sebuah lembaga pendidikan adalah guru dan sistem, memilih guru yang baik serta sistem pembelajaran terbaik. Pada tahun 2006 muridnya hanya 48 siswa, namun saat ini jumlah muridnya sudah mencapai 10 ribu siswa.

“Pada tahun 2017 cita-cita saya sudah terwujud, ada yang memberi *award* sebagai *The Most Favorit School in Indonesia*, 2018 sebagai sekolah yang sistem pembelajarannya paling baik di Indonesia, bahkan tahun 2019 ponpes Amanatul Ummah mendapat penghargaan sebagai pesantren modern inspiratif nomor satu di Indonesia,” pungkas Kiai Asep. ■ afr/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Ponpes Amanatul Ummah. Foto: Arief/nvl

# Komisi VIII Pertanyakan Kesiapsiagaan Pemprov Jabar dalam Penanggulangan Bencana Sesar Lembang

**B**erdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2020 Provinsi Jawa Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 145.81 (tinggi), dimana indeks risiko bencana di Jabar berada pada urutan ke 14. Dalam kaitan itulah, Komisi VIII DPR RI ingin melakukan pengawasan sekaligus memperoleh berbagai informasi dan masukan terkait kondisi perkembangan yang terjadi saat ini dan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencegahan, mitigasi dan Penanggulangan Bencana Sesar Lembang yang dikhawatirkan akan menjadi gempa bumi megathrust.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kabupaten Bandung guna mendapat informasi dan data akurat mengenai mitigasi bencana akibat aktivitas sesar Lembang, di Jawa Barat, Jumat (21/1). Diah mengatakan perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap permasalahan kebencanaan semakin penting disebabkan ancaman bencana yang semakin meningkat, lemahnya proses mitigasi, penambahan jumlah penduduk, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana.

Kemudian, jelas Diah, tata kelola penyelenggaraan dan penanggulangan bencana juga perlu ditingkatkan dan disinergikan.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunspek Komisi VIII ke Kabupaten Bandung. Foto: Ria/rvi

Pasalnya, masalah koordinasi dan sinergi antar kementerian/ lembaga, antar pusat dan daerah masih belum optimal. Selain itu, lanjut Diah, anggaran juga menjadi catatan yang perlu diperkuat dalam penangan bencana. “Analisa dan pemetaan terus dilakukan namun tidak korelasi dengan anggaran dalam kesiapsiagaan. Disampaikan belum tersedia rambu dan papan informasi kebencanaan karena anggaran tidak cukup,” tandas politisi PDI-P itu.

Kekuatan penangan kebencanaan saat ini, menurut Diah ada pada relawan. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk *skill up*. Tidak hanya pendidikan

kebencanaan tetapi juga teknis. Namun diakuinya masih terkendala dengan anggaran, sehingga ini akan menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Terakhir, ia mengapresiasi BPBD Jabar dan Kepala Balai Hutan serta BMKG dan pakar ITB yang mewakili Fakultas Ilmu Kebumihan.

“Terima kasih atas pemaparannya yang komprehensif, sehingga kami memperoleh berbagai informasi dan masukan berharga guna perbaikan kebijakan ke depan terkait penanggulangan bencana, khususnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi megathrust di seluruh wilayah Indonesia,” tutup legislator dapil Jawa Barat III tersebut. ■ rmm/sf



# Komisi VIII Dorong Pemkab Pandeglang Lakukan *Grand Design* Mitigasi Bencana

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan *grand design* mitigasi bencana mengingat wilayah tersebut sangat rawan akan bencana alam. Diketahui sebelumnya, terjadi gempa bumi pada 14 Januari lalu, serta tsunami juga pernah menerjang kabupaten ini pada tahun 2018 silam.

“Salah satu solusinya adalah Pandeglang segera melakukan *grand design* untuk menetapkan tata ruang dan pemukiman. Bupati harus mulai melakukan *grand design* menata kembali tata ruang dan pemukiman seperti pemukiman yang berada di pesisir dan masuk dalam zona merah,” tutur Ace saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (21/1).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyarankan kepada Pemkab Pandeglang untuk dapat melibatkan para ahli dan akademisi dalam



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Novel/nvl

menyusun *grand design* mitigasi, agar hal tersebut bisa meminimalisir dampak jika terjadi bencana yang dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun jika ada korban jiwa.

Selain itu, Ace juga mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan monitoring dan

perkembangan penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang. “Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan BNPB bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pandeglang secara intensif,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI dan Kemensos menyerahkan bantuan sembako 500 paket serta bantuan lumbung sosial dalam rangka penanganan korban bencana alam di Pandeglang yang diterima langsung oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita. Kemudian, Komisi VIII DPR RI bersama BNPB juga ikut memberikan dukungan berupa masker KF94, selimut, *hand sanitizer*, disinfektan, dan sabun batang. ■ nvl/sf

”

**SALAH SATU SOLUSINYA ADALAH PANDEGLANG SEGERA MELAKUKAN GRAND DESIGN UNTUK MENETAPKAN TATA RUANG DAN PEMUKIMAN. BUPATI HARUS MULAI MELAKUKAN GRAND DESIGN MENATA KEMBALI TATA RUANG DAN PEMUKIMAN SEPERTI PEMUKIMAN YANG BERADA DI PESISIR DAN MASUK DALAM ZONA MERAH**

# Baleg Terus Sosialisasikan RUU Prolegnas kepada Seluruh Komponen Masyarakat



Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya saat pertemuan Baleg DPR RI dengan Wagub Sumsel. Foto: Azka/nvl.

**B**adan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 kepada seluruh komponen masyarakat. Tujuannya yaitu agar masyarakat mengetahui proses pembentukannya dan juga bisa memberikan masukan terhadap setiap RUU yang sedang dibentuk, dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan dalam proses sosialisasi Prolegnas dan sekaligus serap aspirasi ini menggunakan dua metode yaitu turun langsung kepada

publik secara langsung dan juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar, organisasi, dan juga tokoh masyarakat terkait dengan RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas tahunan, dan yang sudah masuk Prolegnas prioritas.

“Metodologi yang kita lakukan ini dengan dua metode, turun langsung ke publik dengan *stakeholder* terkait seperti pemerintah daerah, kampus, dan organisasi masyarakat apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Dan juga melaksanakan RDPU untuk mendengarkan pendapat yang lebih spesifik, “ jelas Willy usai pertemuan Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, organisasi masyarakat, perwakilan sivitas

akademika, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya, di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (24/1).

Dalam kunjungan kali ini, Willy mengaku pihaknya memilih Sumsel karena daerah ini menjadi barometer dari dinamika pembangunan. Bahwa saat ini Baleg akan membahas revisi UU Cipta Kerja dan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Apalagi Sumsel dulu merupakan sebagai ladang minyak. “Di (Sumsel) sini dahulu merupakan penghasil minyak, untuk itu kita memilih Sumsel untuk menjadi (tujuan) kunjungan kali ini,” ujar Willy.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan tahun ini ada 40 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, dan delapan di antaranya sudah selesai dibahas, di antaranya Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi, RUU Pengadilan Tinggi Agama, RUU Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, RUU Kejaksaan, hingga yang terbaru RUU Ibu Kota Negara (IKN) telah disetujui menjadi UU.

”

**JIKA INI SELESAI, MAKA, DI BULAN JUNI MELAKUKAN EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN DAN BISA MEMASUKKAN LIST YANG BARU**

“Ini suatu hal yang cukup progress. Semoga dalam waktu dekat kita bisa menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Energi Baru Terbarukan (EBT), RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU ASN, dan RUU Sistem Keolahragaan Nasional, itu suatu hal yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Jika ini selesai, maka, di bulan Juni melakukan evaluasi Prolegnas Prioritas tahunan dan bisa memasukkan *list* yang baru,” optimis legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI itu. ■ **azk/sf**

# Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 ke Sumut

**T**im Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Abdul Wahid melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 40 RUU dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 ditetapkan sebanyak 254 RUU.

“Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 kepada masyarakat,” urai Abdul Wahid dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumut dan jajaran di Medan, Sumut, Senin (24/1).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan masyarakat perlu mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, yang pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Kami informasikan bahwa pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Badan Legislasi telah membentuk tiga Tim Kunjungan Kerja, yaitu Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI dengan Gubernur Sumut. Foto: Oji/nvl

”

**ABDUL WAHID MENGATAKAN SALAH SATU DAMPAK DARI AKTIVITAS PENGANGKUTAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI SUMUT ADALAH RUSAKNYA INFRASTRUKTUR. PERSOALAN INI DIHARAPKAN BISA DIAKOMODIR SALAH SATUNYA MELALUI RUU JALAN YANG SEDANG DIBAHAS DI KOMISI V DPR RI**

Selatan, dan Provinsi Maluku,” imbuh Abdul Wahid.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II ini menjelaskan Prolegnas tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, sebagaimana dalam Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, tertanggal 7 Desember 2021.

Abdul Wahid mengatakan salah satu dampak dari aktivitas pengangkutan yang dilakukan perusahaan perkebunan di Sumut adalah rusaknya infrastruktur. Persoalan ini diharapkan bisa diakomodir salah satunya melalui RUU Jalan di Komisi V DPR RI. “Ini akan menjadi masukan bagi kami di Baleg sebagai aspirasi untuk dibahas,” pungkas Abdul Wahid. ■ oji/sf

# RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

**A**nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrik Lewerissa memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk dalam Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Hal ini disampaikan pada saat Hendrik memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg ke Maluku dalam rangka sosialisasi Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.

“RUU Daerah Kepulauan ini merupakan usul inisiatif DPD dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Kebetulan dalam pembahasan, DPD juga mengusulkan RUU Kepulauan dan BUMDes,” ungkap Hendrik saat pertemuan Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Maluku, Ketua DPRD Maluku, dan beberapa pejabat terkait lainnya, di Ambon, Maluku, Senin (25/1).

Hendrik mengakui di setiap kunjungan kerja ke daerah kepulauan seperti Maluku, pihaknya selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak terkait nasib RUU Kepulauan. Berkaitan dilaksanakannya sosialisasi Prolegnas, Hendrik menjelaskan, agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan RUU yang akan mengatur kehidupan mereka, termasuk proses pembentukan undang-undang.

“Dengan sosialisasi (Prolegnas) ini kita berharap, masyarakat dapat memberikan masukan. Dengan begitu, setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang, senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno yang memimpin jalannya pertemuan meminta penjelasan tentang kelanjutan RUU



Anggota Baleg DPR RI Hendrik Lewerissa bertukar cenderamata usai pertemuan di Ambon. Foto: Kresno/nvl

”

**DENGAN SOSIALISASI (PROLEGNAS) INI KITA BERHARAP, MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN. DENGAN BEGITU, SETIAP RUU YANG AKAN DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG, SENANTIASA MENCERMINKAN KEBUTUHAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

Daerah Kepulauan. “Nenek moyang kami pelaut, yang menghubungkan kami di Maluku, 90 persen lebih bukan darat saja, melainkan laut menghubungkan kami,” jelas Wagub.

Wagub meminta RUU Daerah Kepulauan diperjuangkan seluruh dewan, bukan Anggota DPR dapil Maluku saja. “Tolong kalau bisa ini jadi perjuangan DPR RI, tidak hanya menjadi perjuangan dewan dapil Maluku. Kami perwakilan DPR RI hanya empat orang, mungkin tidak mempengaruhi kebijakan nasional,” pintanya.

Selain meminta penjelasan tentang kelanjutan RUU Daerah Kepulauan, Wagub juga memberikan apresiasi kepada Baleg DPR RI yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Wagub mengatakan, rapat sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk menyebar luaskan Prolegnas RUU kepada masyarakat Maluku. Tapi tim Baleg akan menerima masukan maupun saran dari para peserta rapat. “Saya berharap benar-benar harus (hasil rapat) menjadi catatan penting,” harap Wagub Maluku kepada Baleg DPR RI. ■ eno/sf

# BURT Harapkan Penataan Administrasi di RS *Provider*



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti saat memimpin Kunker BURT ke Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Foto: Eko/nvl

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti memimpin Kunjungan Kerja BURT ke Jawa Timur dalam rangka meninjau pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI yang dilaksanakan Rumah Sakit National Hospital Surabaya sebagai RS *provider* Asuransi Jasindo.

“Dalam konteks kunjungan kerja pada hari ini adalah melakukan pengawasan terhadap rumah sakit *provider* dari Asuransi Jasindo sebagai pelaksana program Jamkestama untuk anggota DPR beserta keluarganya,” jelas Novita di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/1).

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan BURT ke beberapa RS *provider* di sejumlah provinsi di

Indonesia, ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program Jamkestama ini. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terhambatnya proses administrasi di RS *provider*. “Salah satu penyebabnya adalah keterlibatan pihak ketiga yaitu Admedika yang memerlukan waktu relatif lama dalam proses administrasi,” imbuh Anggota Komisi V DPR RI tersebut.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemberian jaminan kesehatan ini merupakan aspek penting bagi Anggota DPR RI, mengingat tugas yang diembannya sangatlah besar. Oleh karena itu, pelayanan harus dikelola secara profesional terlebih Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur seluruhnya berjumlah 87 orang.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014

”

**SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH KETERLIBATAN PIHAK KETIGA YAITU ADMEDIKA YANG MEMERLUKAN WAKTU RELATIF LAMA DALAM PROSES ADMINISTRASI**

menyebutkan bahwa Anggota DPR RI sebagai pejabat negara termasuk anggota keluarganya diberikan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan. ■ eko/sf

# BAKN Harap Kanwil BPN Sumsel Segera Selesaikan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK

**K**etua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Wahyu Sanjaya berharap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan segera menyelesaikan beberapa hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun Anggaran (TA) 2017-2019. Pasalnya, walaupun BPK telah menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setidaknya masih terdapat 7 temuan, 13 permasalahan, dan 20 rekomendasi terkait pertanahan. Bahkan, terdapat 1 permasalahan yang membuat kerugian negara sebesar Rp218,53 juta.

“Kita melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama masalah penetapan permohonan atas pelayanan survey, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya dan standarisasi biaya pengukuran. Inilah yang memang menjadi temuan BPK pada saat Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan pemeriksaan kinerja Kementerian ATR/BPN, karena di lapangan belum ada standarisasi atau aturan yang mengatur berapa biaya akomodasi yang ditetapkan,” ujar Wahyu saat memimpin pertemuan Tim Kunker BAKN DPR dengan jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumsel di Palembang, Rabu (26/1).

Selain itu, legislator dapil Sumsel II tersebut mengatakan, hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) tahun 2015 dan semester I tahun 2016 juga mengungkapkan beberapa permasalahan. Misalnya, peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak

Ketua Badan BAKN Wahyu Sanjaya.  
Foto: Jaka/nvi



relevan dan tidak diimplementasikan dengan kondisi saat ini, sebanyak 382 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kabupaten Banjar dikuasai PT PU sebagai inti plasma dan sebanyak 33 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki warkah tanah.

“Untuk itu, hasil temuan ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset dan belum meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian, kenaikan pendapatan per *personal income* masyarakat subjek reforma agraria sebagai indikator kinerja utama sasaran pada Ditjen Penataan

Agraria tidak tepat,” imbuh politisi Partai Demokrat ini.

Namun Wahyu juga mengapresiasi, hasil-hasil temuan BPK ini sudah berjalan untuk diselesaikan Kanwil BPN Sumsel. Dan mereka juga terlihat bersungguh-sungguh dengan strategi yang telah dirancang untuk diimplementasikan.

“Kita berharap temuan-temuan itu bisa selesai dan tidak terjadi lagi, karena kan yang menjadi perhatian itu apabila adalah temuan BPK tapi terus berulang, kalau begitu kan berarti terjadi pembiaran. Saya melihat Kanwil BPN Sumsel sudah ke arah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu,” ungkap Wahyu. ■ jk/sf



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat pertemuan dengan manajemen Rumah Sakit BIMC dan perwakilan Jasindo. Foto: Taufan/nvl

# BURT Tegaskan Peserta Jamkestama Harus Mendapat Layanan Maksimal

**K**etua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menegaskan pemegang kartu program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) harus dilayani secara maksimal, sebab hal ini didasarkan pada temuan di lapangan bahwa pemegang kartu tersebut tidak mendapatkan layanan penuh dan optimal. Untuk itu, ia meminta Jasindo sebagai operator program Jamkestama untuk berkoordinasi kepada rumah sakit yang menjadi mitra atau *provider*, sehingga pemegang kartu Jamkestama terlayani secara baik.

“Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat masalah mengenai pemegang kartu program Jamkestama ini. Pertama tidak mendapatkan layanan VVIP, padahal sudah jelas bahwa Jamkestama itu masuk ke dalam layanan paling teratas. Kedua ada beberapa obat maupun vitamin yang tidak ter-cover. Dan terakhir masih

”

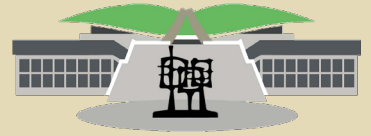
**JIKA LAYANAN KEPADA PEMEGANG KARTU JAMKESTAMA KE DEPANNYA MASIH DIPERSULIT, TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN BAHWA BURT DPR RI AKAN Mencari ASURANSI LAIN YANG LEBIH SANGGUP DALAM MELAYANI KEPADA PESERTANYA.**

banyak yang mendapatkan kesulitan dalam pendataan,” pungkas Agung saat menghadiri pertemuan BURT DPR RI dengan manajemen Rumah Sakit BIMC dan perwakilan Jasindo, di Denpasar, Bali, Sabtu (22/1).

Politisi Partai Demokrat ini menilai, permasalahan tersebut didasarkan adanya *miss* komunikasi antara pihak asuransi (Jasindo) dengan rumah sakit yang menjadi mitra kerjanya. “Kita ingin cukup tunjukkan kartu (Jamkestama) saja, pihak rumah sakit itu sudah tahu dan langsung dilayani tanpa daftar dan proses lagi. Bukannya kita ingin

diperlakukan spesial, tetapi memang itu yang sudah terdaftar dalam program Jamkestama yang pelayanan maksimal dan teratas,” sebutnya.

Agung mengatakan jika layanan kepada pemegang kartu Jamkestama ke depannya masih dipersulit, tidak menutup kemungkinan bahwa BURT DPR RI akan mencari asuransi lain yang lebih sanggup dalam melayani kepada pesertanya. “Kita lihat saja ke depannya. Jika *gini* terus kita akan cari saja asuransi lain yang sanggup. Berarti kan Jasindo itu tidak sanggup,” seloroh Anggota Komisi III DPR RI itu. ■ tn/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyambangi Rumah Inklusi yang memberikan pendidikan tertentu bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (19/1). Foto: Bonnis/nvl



Ketua Grup Kerja Sama Antar Parlemen (GKSAB) DPR RI - Parlemen Ukraina Sugeng Suparwoto saat bertemu dengan Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasyil Hamiamin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1). Foto: Ojji/nvl



Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha saat menghadiri Rakorwas Inspektorat Utama Setjen DPR RI di Jakarta, Kamis (27/1). Turut hadir Pimpinan BURT DPR RI, Sekjen DPR RI, beserta pejabat di lingkungan Setjen DPR RI. Foto: Novel/nvl

